



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KEPENGHULUAN MUKTI JAYA
KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penekasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Wilayah Kepenghuluan Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN MUKTI JAYA KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penekasan batas wilayah Kepenghuluan Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Rokan/Kepenghuluan Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako.

Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Mukti Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Mukti Jaya dengan Kepenghuluan Lenggadai Hilir dimulai dari Sungai Rokan dengan TK.1 : $1^{\circ} 52' 25,944''$ N- $100^{\circ} 55' 51,869''$ E, selanjutnya menuju utara mengikuti Sungai Rokan sampai dengan TK.2 : $1^{\circ} 52' 50,805''$ N - $100^{\circ} 56' 30,686''$ E, selanjutnya menuju timur laut ke SK.5 dan mengikuti SK.5 sampai dengan TK.3 : $1^{\circ} 52' 57,804''$ N - $100^{\circ} 56' 41,858''$ E, selanjutnya menuju ke tenggara mengarah ke tanah Pak Budi Kuncoro dekat Parit Navigasi N4 dengan TK.4 : $1^{\circ} 52' 23,099''$ N - $100^{\circ} 57' 9,840''$ E,;
- b. batas antara Kepenghuluan Mukti Jaya dengan Kepenghuluan Lenggadai Hulu di mulai dari Tanah Pak Budi Kuncoro Dekat Parit Navigasi N4 dengan TK.4 : $1^{\circ} 52' 23,099''$ N- $100^{\circ} 57' 9,840''$ E, selanjutnya menuju tenggara ke Samping PAMSIMAS dengan TK.5 : $1^{\circ} 52' 2,322''$ N- $100^{\circ} 57'$

22,114" E, selanjutnya menuju tenggara mengarah ke Parit dengan TK.6 : 1° 51' 54,339" N-100° 57' 26,829" E, selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti Parit sampai dengan TK.7 : 1° 51' 55,562" N-100° 57' 28,368" E, selanjutnya menuju barat laut lebih Kurang 25 meter ke arah Rumah Pak Sugiono dengan TK.8 : 1° 52' 7,939" N-100° 57' 42,450" E, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju Jalan Lintas Bagansiapiapi dengan TK.9 : 1° 52' 9,961" N-100° 57' 44,968" E, selanjutnya menuju ke tenggara mengikuti Jalan Lintas Bagansiapiapi sampai dengan Parit Saping jalan Sepakat dengan TK.10 : 1° 50' 55,420" N-100° 58' 36,677" E, selanjutnya menuju barat daya mengikuti Parit disamping Jalan Sepakat sampai Jalan Swadaya dengan TK.11 : 1° 50' 25,210" N-100° 57' 53,438" E, selanjutnya menuju barat laut mengikuti Jalan Swadaya sampai dengan TK.12 : 1° 50' 28,569" N-100° 57' 51,381" E, selanjutnya menuju barat daya Mengarah dan mengikuti SK.7 sampai dengan TK.13 : 1° 50' 24,484" N-100° 57' 45,778" E, selanjutnya menuju barat laut mengarah Lahan Masyarakat dengan TK.14 : 1° 49' 30,101" N-100° 56' 24,837" E, selanjutnya menuju barat daya mengarah Lahan Masyarakat dengan TK.15 : 1° 49' 42,431" N-100° 56' 14,921" E, selanjutnya menuju tenggara mengarah ke SK.7 dengan TK.16 : 1° 49' 38,152" N-100° 56' 10,894" E, selanjutnya menuju barat daya mengikuti SK.7 ke arah Pinggir Sungai Rokan dengan TK.17 : 1° 49' 26,832" N-100° 56' 19,736" E, selanjutnya menuju barat daya mengarah ke Sungai Rokan dengan TK.18 : 1° 49' 3,403" N-100° 55' 36,777" E; dan

- c. batas antara Kepenghuluan Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang dengan Kepenghuluan Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako di mulai dari titik batas Sungai Rokan dengan TK. 18 : 1° 49' 3,403" N - 100° 55' 36,777" E, selanjutnya menuju utara mengikuti Sungai Rokan sampai Berbatasan dengan Kepenghuluan Lenggadai Hilir dengan TK.1 : 1° 51' 16,501" N -100° 55' 41,743" E.

BAB III PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Mukti Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

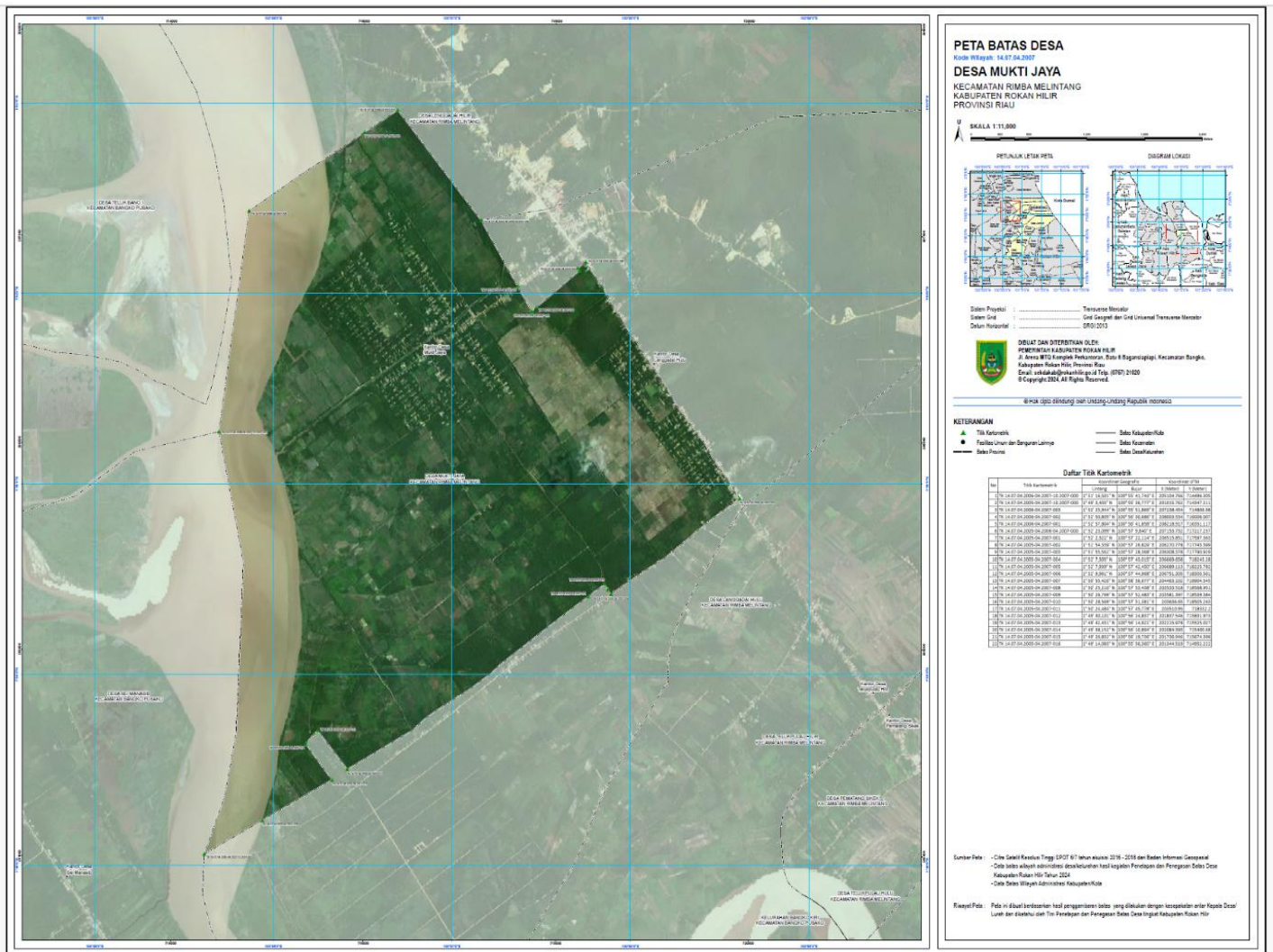
FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 72



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 69 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGESAHAN BATAS WILAYAH
 KEPENGHULUAN MUKTI JAYA
 KECAMATAN RIMBA MELINTANG
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN MUKTI JAYA
 KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG